

POLICY BRIEF

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PABRIK KELAPA SAWIT MENUJU *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* GOALS (SDGs) DI KABUPATEN BATANG HARI

Peneliti : Novia Susianti, SKM., Bio.Med.

A. RINGKASAN

B. PENDAHULUAN

Industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian (*agro-based industry*), berkembang di negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Industri ini memegang peran cukup penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membuka peluang kerja yang besar bagi masyarakat setempat yang berada di lokasi perkebunan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) memang menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia dan saat ini masih menjadi andalan, termasuk industri kelapa sawit. Namun, tak dapat dipungkiri perkembangan industri ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang muncul pada tahap konstruksi, hingga tahap operasi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberlakukan *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan) dan berwawasan lingkungan sesuai amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penggunaan SDA harus dilakukan secara bijak dilandasi tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economical viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Pemberlakuan upaya preventif ini ditetapkan oleh pemerintah dengan mewajibkan setiap pemrakarsa (pelaku industri) melakukan pengelolaan lingkungan sesuai kesepakatan yang tertera di dalam dokumen lingkungan pelaku industri tersebut termasuk di Kabupaten Batang Hari sebagai kabupaten yang memiliki potensi besar perkembangan industri ini.

Kabupaten Batang Hari saat ini memiliki 38 perkebunan dan 7 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah memiliki dokumen Amdal. Akan tetapi, masih ditemukan perkebunan dan PKS yang belum mengimplementasikan kewajiban yang harus mereka lakukan berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki, seperti tidak memiliki tempat pembuangan limbah B3 dan tidak melakukan pelaporan secara rutin terhadap pengelolaan lingkungan. Ketidaktahuan apa yang telah menjadi kewajiban dan tertuang di dalam dokumen lingkungan seringkali menjadi alasan

dari pihak perusahaan. Selain itu, kurangnya integrasi *leading sector* dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan menjadi sebuah kendala dalam perwujudan peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan sesuai kepemilikan dokumen lingkungan.

Mengingat pengelolaan dampak penting kegiatan industri kelapa sawit sangat menentukan kualitas lingkungan saat ini dan akan datang sesuai kesepakatan agenda pembangunan universal SDGs, maka implementasi dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan industri kelapa sawit sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, penting dilakukan identifikasi efektifitas implementasi dokumen lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam mendukung *sustainable development* di Kabupaten Batang Hari, dengan mengevaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan pada perusahaan yang telah beroperasi melakukan kewajiban perusahaan untuk pengelolaan lingkungan serta menentukan faktor-faktor yang dapat mengungkit efektifitas pelaksanaan tersebut.

C. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan *indepht interview*, telaah dokumen, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Lokasi penelitian dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki dokumen Amdal
2. Lokasi kecamatan yang berbeda, didapatkan 2 Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
3. Pabrik sedang dalam keadaan beroperasi, minimal lebih dari 1 tahun
4. Adanya dokumen pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari

Penentuan faktor penting dan potensial program menggunakan pengukuran skala Likert 1-5, dimulai dari Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju dan Sangat Setuju. Pengkategorian dilakukan menjadi: (1) Penting bila rata-rata \geq mean (data berdistribusi normal) atau median (data tidak berdistribusi normal), (2) Kurang penting, bila $<$ mean (data berdistribusi normal) atau median (data tidak berdistribusi normal). Analisis data menggunakan; (1) analisis situasional untuk menggambarkan kondisi eksisting pada saat penelitian (2) analisis statistik, menggunakan software SPSS versi 23 untuk menentukan faktor penting dengan kategori; 0-74,9% kurang penting, $\geq 75\%$ penting (3) analisis *fit/gap* untuk memetakan faktor penting berdasarkan kuadran I-IV, sehingga ditentukan faktor penting yang harus menjadi prioritas dilaksanakan.

D. HASIL / TEMUAN

1. Kondisi Eksisting Perusahaan.

Telah terdapat dukungan manajemen, teralokasikannya dana untuk pengelolaan lingkungan, dan pihak perusahaan telah menggunakan pihak ketiga dalam melakukan pemantauan parameter lingkungan yang dipersyaratkan, namun belum tersedianya SDM pengelola lingkungan pada kedua lokasi penelitian. Pada aspek ekologi, ditemukan 1 dari 2 perusahaan yang belum melaksanakan pengendalian pencemaran udara maupun pengelolaan limbah B-3 secara rutin sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen RKL-RPL. Terkait sarana prasarana, kedua perusahaan telah menyediakan tempat penyimpanan limbah B-3, kolam IPAL, bahkan telah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemantauan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan.

Pada aspek ekonomi, perusahaan telah mempersiapkan dana untuk pengelolaan lingkungan yang ditandai dengan menyediakan anggaran untuk sarana prasarana seperti penyimpanan limbah B3, kolam IPAL, bahkan bekerjasama

dengan pihak ketiga untuk pemantauan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan. Namun belum terdapat dana peningkatan keterampilan SDM pengelolaan lingkungan. Sementara itu, pada aspek sosial, masyarakat telah berkesempatan bekerja di perusahaan namun dikarenakan keterbatasan pendidikan mengakibatkan hanya 60-80% tenaga kerja perusahaan terdiri dari unsur masyarakat sekitar.

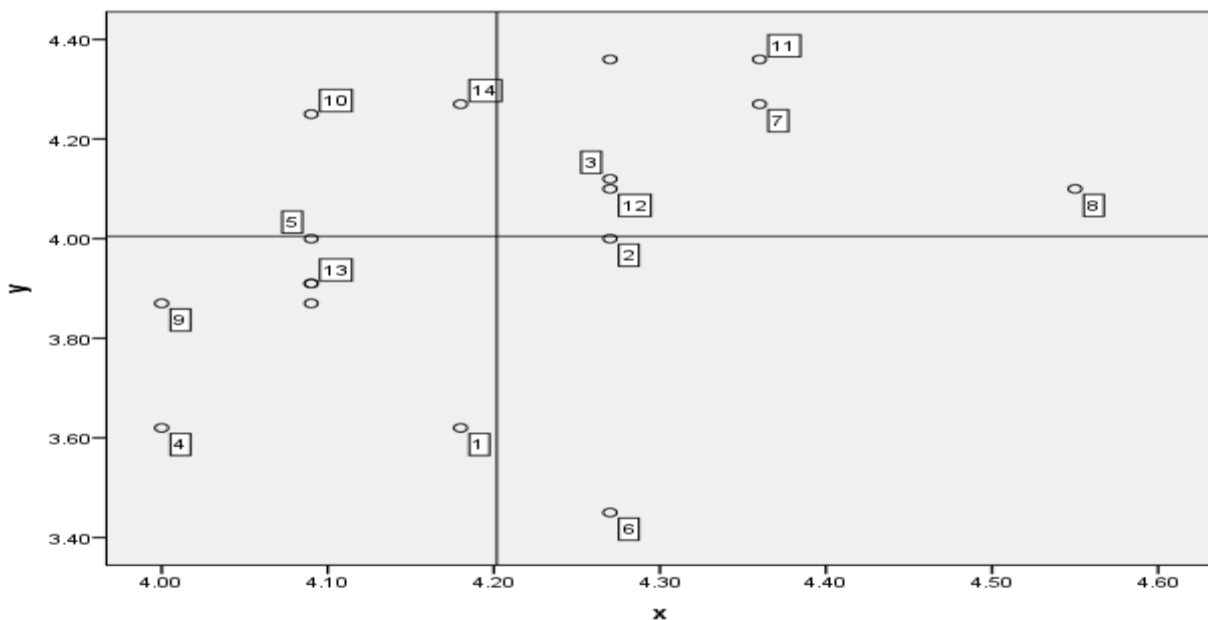
2. Faktor-Faktor Penting berdasarkan Indikator SDGs

Pada aspek ekologi, terdapat 5 faktor penting yaitu; (1) implementasi 3R untuk limbah non B3, (2) implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (3) implementasi pengelolaan B3, (4) implementasi pemberdayaan masyarakat, (5) implementasi pencapaian efisiensi energi. Pada aspek ekonomi, terdapat 4 faktor penting yaitu; 1) alokasi dana implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (2) alokasi dana implementasi 3R limbah non B3, (3) alokasi dana implementasi pengelolaan limbah B3, (4) alokasi dana implementasi efisiensi energi.

Sedangkan pada aspek sosial, ditemukan pada aspek sosial ditmeukan 5 faktor yaitu: (1) publikasi dan penghargaan program pengembangan masyarakat, (2) hubungan sosial internal dan eksternal, (3) monitoring dan evaluasi program pengembangan masyarakat, (4) implementasi program pengembangan masyarakat, (5) perencanaan program pengembangan masyarakat.

3. Pemetaan Faktor Penting berdasarkan Kepentingan dan Potensial Program

Pemetaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap faktor-faktor diatas, berdasarkan tingkat kepentingan faktor pada sumbu 'x', dan potensial program pada sumbu 'y'.



Gambar
Pemetaan Faktor-Faktor Penting Pengelolaan Lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018

Terdapat 9 faktor pada kuadran A dan B yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan oleh perusahaan di dalam pengelolaan lingkungan sesuai konsep SDGs, terdiri dari: (1) implementasi limbah B3 (2) implementasi pelaksanaan 3R untuk limbah non B3 (3) alokasi dana untuk implementasi 3R (4) alokasi dana untuk implementasi pengelolaan limbah B3 (5) Monitoring evaluasi program pemberdayaan masyarakat (perwujudan CSR) (6) implementasi program pemberdayaan masyarakat (7) implementasi program pemberdayaan masyarakat (8) hubungan sosial internal dan eksternal (9) program 3R Limbah Non B3.

4. Strategi Peningkatan Efektifitas Implementasi Pengelolaan Lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan terwujudnya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dalam perwujudan konsep SDGs, yaitu:

1. Mengimplementasikan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai parameter yang telah ditetapkan, dengan komitmen di dalam pengalokasian sumber daya (dana, SDM pengelola lingkungan, dan sarana prasarana).
2. Mengimplementasikan pengolahan limbah non B3 sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dengan pemanfaatan teknologi modern dan alokasi dana serta prasarana.
3. Mewujudkan hubungan sosial internal dan eksternal yang baik dengan perwujudan bentuk dana CSR dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga mengarahkan paradigma bagi perusahaan dari *single bottom line* (perusahaan hanya berorientasi profit) menuju *triple bottom line* (3BL) yang bermakna perusahaan komitmen terhadap lingkungan (*planet*) dan manusia (*people*).

E. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1. Perusahaan agar menyediakan tenaga pengelola lingkungan dengan latar belakang pendidikan dan atau kompetensi pengelola lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan menjadi tugas pokok tersendiri yang didukung oleh ketersediaan struktur di perusahaan terkait pengelolaan lingkungan.
2. Perusahaan agar melakukan koordinasi dan terlibat dalam perencanaan rutin pemerintah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan mandat kewajiban perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR.
3. Perusahaan agar bekerjasama dengan instansi terkait program pemberdayaan masyarakat yang akan diwujudkan, dengan melakukan pendekatan 3 elemen pemerintah, perusahaan dan masyarakat di dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dalam mendukung pencapaian SDGs.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badrun, Y dan Mubarak. (2010). Pengelolaan Lingkungan Perairan sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan Global. *Seminar dan Lokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup* . Repository Universitas of Riau.
- Kemendes RI. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit* . Dipetik Februari 12, 2018, dari www.hukor.depkes.go.id.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*.
- Kuhre, W.L (1996), in Handoko, F.C. . (2017). Implementasi Audit Lingkungan pada Industri Perhotelan di Kota Malang. *Parsimonia*, 3(No. 3), 57-68.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2012). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*. Jakarta: Berita Negara RI Nomor 990 Tahun 2012.
- Mukhtasor. (2008). Pengantar Ilmu Lingkungan . Surabaya: Itspress.
- Panuluh, S., Fitri,M.R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia in September 2015-September*

2016. International DGO Forum on Indonesian Development. Retrieved from www.infid.org

Pemerintah Kabupaten Batang Hari. (2018). *Profil Kabupaten Batang Hari*. Retrieved from <http://batangharikab.go.id/bat/statis-25-perkebunan.html>

Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Sakina Rahma Diah Setiawan. (2017). *Kompas.com*. Retrieved 2018, from Pada 2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah: <http://ekonomi.kompas.com>

Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.